

# Konstruksi Hegemoni Kekuasaan dalam Media Sosial: Komparasi Postingan Instagram Walikota Makassar dan Bupati Gowa

**Reskiyanti Nurdin**

*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

e-mail: reskiyanti.nurdin@uin-alauddin.ac.id

## **Abstrak**

*Studi ini akan membahas tentang konstruksi hegemoni kekuasaan dalam media sosial khususnya dalam postingan Instagram. Komparasi dilakukan kepada kepala daerah Walikota Makassar dengan Bupati Gowa sebagai representasi kepala daerah yang rajin membagikan aktivitas kerja atau hiburan bagi pengikutnya (followers). Postingan mereka sebagai wilayah diskursus dimaknai sebagai pertarungan hegemoni untuk memengaruhi netizen sebagai sesuatu yang hal yang biasa (common sense). Pendekatan teori dengan menggunakan Ernesto Laclau & Chantal Mouffe tentang hegemoni sebagai alat untuk analisis merekonstruksi kekuasaan dalam ruang yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe analisis wacana diskursus untuk menjelaskan dan memahami postingan gambar dan video bagaimana efek yang dihasilkan. Argumentasi studi ini melihat Walikota Makassar terlihat gagal dalam mengkonstruksi hegemoni kekuasaannya baik dari akun pribadinya maupun berita tentang kebijakannya, berbeda dengan Bupati Gowa yang berasal dari dinasti politik yang mulai lemah berhasil menghegemoni pengikutnya dengan wajah baru pewaris klan Yasin Limpo.*

## **Kata Kunci :**

*Hegemoni, Kekuasaan, Instagram*

## **PENDAHULUAN**

Studi ini akan membahas tentang komparasi postingan media sosial Instagram dari dua kepala daerah, yakni Walikota Makassar dengan Bupati Gowa. Dua orang ini dijadikan perbandingan sebagai kepala daerah yang bertetangga dan memiliki masyarakat urban dan sub urban. Kemudian kepala daerah ini juga diprediksi akan maju dalam kontestasi elektoral sebagai

calon Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka seringkali membagikan postingannya sebagai bentuk sosialisasi dan proses hegemoni ke masyarakat. Sehingga perlu untuk merekonstruksi wacana diskursus atas gambar ataupun video dari postingannya di Instagram.

Sebagai sarana yang paling banyak digunakan oleh para politisi dalam bersosiali-

sasi dan berinteraksi dengan masyarakat, media sosial menjadi instrumen wajib untuk dimiliki. Adanya media sosial memberikan akses kemudahan politisi dalam menampilkan postingan dengan bentuk foto dan gambar kemudian memberikan sedikit sentuhan kata ataupun kalimat. Kualitas foto atau video sangat memengaruhi netizen untuk bisa memberikan tanda suka “like” atau ikut berkomentar. Era digital kemudian ditandai dengan kehadiran sosial media yang memberikan dunia tanpa batas untuk bisa melihat aktivitas keseharian orang lain.

Media sosial Instagram dan Tiktok menjadi tren baru bagi politisi sebagai sarana untuk membentuk citra dan image baik. Pencitraan yang bisa dikelola dengan nilai cukup murah tetapi mampu menjangkau semua konstituennya yang memiliki akun media sosial. Media sosial mampu memberi umpan balik dari pesan politik yang disampaikan kepada publik, khususnya para pemilih milenial juga pemilih gen Z dengan potensi jumlah yang cukup signifikan (Weninggalih & Fuady, 2021). Ada komunikasi dua arah dari politisi kepada pengikutnya untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan fitur “komentar” dan “pesan langsung” (dm). Pengguna media sosial adalah salah satu contoh aktual bagaimana masyarakat jejaring bekerja dan berinteraksi (Susanti, 2015). Hegemoni pun dilakukan oleh para politisi untuk membuat jejaring kekuasaan secara penuh kepada masyarakat dengan cara tanpa kekerasan ataupun pemaksaan. Mekanisme yang dilakukan dengan visualisasi

gambar atau video yang tampak cantik, rapi dan elegan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Studi terdahulu Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram (Rosyidah & Nurwati, 2019), ternyata gender menjadi variabel demografi dominan dan sangat signifikan berpengaruh, khususnya pada perempuan. Riset ini lebih fokus pada komparasi gender menjadi subjek dalam penggunaan media sosial Instagram. Kemudian ada riset tentang Pakaian Syar'i, Media, dan Konstruksi Kesalehan Perempuan (Afifah, 2019) dengan pendekatan post strukturalis dalam melihat konstruksi wacana di media tentang pakaian syar'i dan pakaian yang tidak syar'i. Studi lain tentang Islam, Hegemoni, dan Konstruksi Sosial: Studi Realitas Muslim Perkotaan di Indonesia. Studi ini menggambarkan operasi hegemoni ideologi dalam pembentukan konstruksi sosial muslim perkotaan terbalut dengan kemas-paham, aliran, dan golongan (Darmalaksana, 2021).

Walaupun riset sebelumnya sama dengan riset ini yang berfokus pada konstruksi wacana hegemoni khususnya di media atau media sosial. Penulis justru berangkat dari hal yang berbeda, yaitu dari postingan gambar dan video dari kepala daerah yang punya popularitas tinggi dan hasrat untuk menaiki tangga jabatan lebih tinggi, yakni Gubernur. Di sini tidak melihat bahwa postingan para elit politik ataupun pejabat sebagai pencitraan dirinya, tetapi lebih dalam melihat bagaimana hegemoni dari

gambar dan video tersebut dalam arena pertarungan wacana. Selanjutnya, terbentuknya antagonisme dalam politik yang terjadi di antara kedua kepala daerah.

## TINJAUAN TEORETIS

### *Hegemoni*

Hegemoni yang dimaksud dalam studi ini bukanlah tentang apa yang dipahami oleh Gramsci tentang kepemimpinan melalui intelektual dan moral (Novianto, 2017). Meskipun berpijak pada teori hegemoni Gramsci, Laclau dan Mouffe memiliki perbedaan dengan pemikiran Gramsci dalam melakukan analisa dalam aktivitas politik, di mana Gramsci paradigma teoritiknya berpijak pada analisa kelas, sementara Laclau dan Mouffe paradigma teoritiknya berdiri pada analisa diskursus (*discourse analysis*). Teori diskursus Laclau dan Mouffe berasumsi bahwa semua obyek dan tindakan memiliki makna, dan makna itu merupakan produk dari sistem-sistem partikular yang memiliki perbedaan-perbedaan signifikan, yang bersifat spesifik secara historis (Hutagalung, 2008) Teori ini menelaah bagaimana praktik-praktik sosial mengartikulasikan dan mengkontestasikan diskursus-diskursus yang membentuk realitas sosial.

Dalam *Hegemoni dan Strategi Sosialis*, Laclau dan Mouffe melanjutkan gagasan Gramsci membubarkan sepenuhnya pembagian masyarakat menjadi basis dan superstruktur, sesuatu yang Gramsci sendiri tidak melakukannya (dan yang menyebabkan beberapa kritik berpendapat bahwa Laclau dan Mouffe tidak Marxis dalam

arti sebenarnya). Bagi Laclau dan Mouffe, tidak ada realitas material objektif, atau dasar, yang membagi kelompok orang ke dalam kelas-kelas; melainkan, kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat adalah semua hasil dari proses politik dan diskursif. Politik memiliki keunggulan, seperti yang dijelaskan Laclau.

Hegemoni diartikan “*a political type of relation, a form of politics*”. Terwujudnya hegemoni melalui hubungan diskursus antara subjek dengan ranah sosial. Hal ini diartikan bahwa pertarungan kuasa berlangsung di wilayah *discourse* (wacana). Atau siapa yang bisa memenangkan pertarungan gagasan menjadi hal mutlak agar keberlangsungan hegemoni bisa terjadi. Hegemoni dalam konteks politik, akan memunculkan antagonisme yang kemudian melahirkan *political frontier*. Dengan *political frontier* pertarungan hegemoni pun terjadi dan dikondisi yang sama akan terbangun *chain of equivalence* di antara para pendukung dan pembenci dari subjek.

Laclau menyatakan hegemoni bukan dalam pandangan pemikiran yang positivistik secara konseptual. Dia ingin kita memahami hegemoni dari, *pertama*, semua realitas sebagai hasil pertarungan. *Kedua*, realitas bukanlah sesuatu yang terpenting, tetapi pertarungan apa yang dihasilkan setelah realita. *Ketiga*, dalam pertarungan biasanya mengandung atau terdiri dari; orang yang membuat keputusan, ada aktivitas aksi, ada demonstrasi jalan, ada gerakan tagar di sosial media, dan lain-lain (Tohari, et al., 2002). Sehingga Laclau dianggap relativitas atau menolak kebe-

naran tunggal yang mainstream (Boucher, 2008).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis wacana (diskursus) yang dikembangkan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Penelitian ini disajikan dengan bentuk deskripsi oleh karena itu digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif sendiri merupakan metode dengan mengumpulkan, menganalisa, serta menyajikan data informasi yang sebenar-benarnya. Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Fakta menunjukkan bahwa paradigma kritis yang diinspirasi dari teori kritis tidak bisa melepaskan diri dari warisan Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya (Supriyadi, 2015).

## PEMBAHASAN

Menurut post-strukturalisme dimensi politik yang tidak dapat dilepaskan dari subjek apa pun. Ketidaksepakatan dalam interaksi dan hubungan sosial mencirikan dimensi politik. Akibatnya, terjadi perdebatan tentang cara melihat objek. Sifat politik ini mendasari semua sikap dan hubungan politik. Karena kondisi politik mempengaruhi lingkungan sosial, sangat penting untuk memiliki politik, yang mengacu pada keterampilan mengelola, berkoordinasi, dan bernegosiasi dengan pihak-

pihak yang terlibat dalam hubungan politik.

Cara untuk bagaimana mengkomparasikan dua kepala daerah dalam diskursus hegemoni di setiap postingan instagramnya akan menggunakan analisis Laclau sehingga kerangka berfikirnya pun harus memilih kerangka yang mana. Kerangka berpikir Laclau terbagi atas empat, yakni dimensi *the social* atau *linguistik*, *the political*, *subject position/political subjectivity* dan *the politic* (Tohari, et al., 2002). Argumentasi ini akan lebih condong menggunakan *the political*, *subject political* dan *the politics* tetapi tidak melepaskan diri dengan *the social* sebagai basis dari kompleksitas elemen-elemen yang mengitari dari fokus kajian tulisan ini. Wacana dapat dilihat sebagai penentuan makna parsial yang dilakukan dalam upaya untuk menetapkan *nodal point* (Laclau & Mouffe, 2014). Akibatnya, hegemoni merupakan aktivitas artikulasi yang menciptakan *nodal point* yang sebagian memperbaiki makna sosial dalam sistem yang tidak komprehensif. *Nodal point* ini menjadi subjektivitas seseorang dalam melihat permasalahan, sehingga bisa saja *nodal points* bisa menjadi *elements*, bisa sebagai diskursus atau menjadi *floating signifier*.

Tetapi bisa saja *nodal points* ini menjadi *empty signifier* alias tidak ada atau ruang kosong dalam sebuah diskursus (Laclau & Mouffe, 2014). Satu identitas bisa memiliki perbedaan dalam merangkai proses artikulasi dengan makna tertentu. Misalnya saja dengan kata “Kepala Daerah”, arti yang bisa muncul yaitu: penguasa, pemim-

pin, pejabat publik, partai politik, koruptor, birokrasi dan lain sebagainya. Sehingga arti ini bisa menimbulkan konten negatif atau tidak sepenuhnya memberi arti positif. Ini menimbulkan arti yang beragam dan menjadi tidak jelas. Dasar ini kemudian kita bisa sebut yang terjadi adalah *being*, tetapi *becoming*. Jika *being* mengimajinasikan sesuatu sudah terjadi dari asalnya, tetapi *becoming* melihat segala sesuatu dari sananya memang kosong, dan harus diisi agar dia menjadi sesuatu (Tohari, et al., 2002). Mengapa harus melihat sesuatu menjadi *empty*, karena Laclau & Mouffe (2014) mengajak kita untuk berpikir berbeda, agar arti dari narasi-narasi terisi dalam ruang kosong tersebut. Selanjutnya, *emptiness* ini penting dalam memahami *politics* sebagai ruang kontestasi untuk tidak memfinalkan makna sosial. Ketika artinya sudah tetap dan mengikat artinya *the political* itu kemudian hilang.

Sebelum mengelaborasi tentang hegemoni kekuasaan postingan Instagram dari dua kepala daerah ini, perlu dipahami lebih dulu bahwa fakta setiap objek dibentuk sebagai objek wacana (diskursus) tidak ada hubungannya dengan apakah penulis dalam dunia tersebut, atau dengan posisi oposisi realisme/idealisme (Laclau & Mouffe, 2014). Misalnya, gempa bumi atau jatuhnya sebuah batu bata adalah peristiwa yang pasti ada, dalam arti terjadi di sini dan saat ini, terlepas dari keinginan kita. Tetapi apakah “kekhususan” mereka sebagai objek yang berdiri sendiri dalam istilah 'fenomena alam' atau 'ekspresi dari murka Tuhan, tergantung pada posisi seseorang

di bidang diskursif. Untuk itu memberikan informasi-informasi yang ada tentang dua objek perbandingan menjadi penting untuk didalami.

### ***Antagonisme Walikota Kota Dunia vs Dinasti Yasin Limpo***

Ketika masyarakat Makassar ditanyakan tentang kebijakan Dani Pomanto yang diingat dan belum terwujud, maka pasti jawabannya adalah Kota Makassar sebagai kota dunia. Mendefinisikan kota dunia dari perspektif Dani Pomanto dengan masyarakat, pastinya akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Tetapi dengan indikator “Kota Dunia”, setidaknya kesepahaman orang-orang, pasti akan merujuk dengan kota-kota besar yang ada di luar negeri. Misalnya saja kota London, yang sangat representatif untuk dijadikan kota dunia yang menjadi idaman bagi negara maju. Kota dunia adalah *nodal point* yang dimaksud dalam Laclau sebagai pelekatan informasi bagi seseorang. Kemudian muncullah artikulasi dari *nodal point* ini tentang kota banjir, kota macet, kota begal, kota kumuh, dan seterusnya. Hingga di periode kedua, istilah ini masih menjadi jargon yang dikenang buruk oleh orang-orang yang tidak suka kepada sosoknya.

Selanjutnya, *nodal point* yang diketahui oleh public adalah sebagai anak Lorong. Pada pemilihan walikota di Makassar tahun 2018 salah satu *tagline* Dani Pomanto adalah dengan istilah *anak lorongna Makassar*. Istilah ini terlihat menjustifikasi dirinya sebagai bentuk lawan kata dari kelompok elit sekaligus lawan politiknya saat itu yang didukung oleh 10 partai

besar. Dani Pomanto berupaya untuk menegaskan dirinya sebagai bagian terkecil dari kelompok masyarakat Makassar. Dengan banyaknya lorong atau setapak di Makassar, dia ingin dikenal dalam komunitas lorong. Sederhananya bahwa dia pun berusaha melawan wacana tentang sosok yang bukan putra asli daerah Makassar tetapi berasal dari Gorontalo. Rekam jejaknya yang pernah maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Gorontalo, membuatnya harus bisa memberikan informasi tentang jubah asalnya yang lama dan kini sudah berganti baru.

Fenomena kemenangan kotak kosong pada pemilihan walikota Makassar di tahun 2018, dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk kemenangan Dani Pomanto. Alasannya, *Pertama*, Dani Pomanto memainkan perannya sebagai korban politik yang terzalimi atas gugatan lawan politiknya di PTUN atas pelanggaran mal administrasi. *Kedua*, Dani Pomanto sebagai orang yang bebas dari dukungan politik. *Ketiga*, Dani Pomanto direpresentasikan sebagai kotak kosong, yang sejak awal memang sudah memenangkan pertarungan ini. Pada masa ini, masyarakat perlahan mulai berpihak kepada Dani Pomanto. Sehingga terjadi fluktuasi keberpihakan atas dirinya.

Kemudian elemen terakhir dari nodal point Dani Pomanto adalah polemik akan pembangunan stadion Mattoangin. Bangunan stadion yang dianggap Dani Pomanto tidak sesuai dengan amdal lalu lintas jalan di sekitar stadion mattoangin, yang akhirnya mengkritik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Gubernur. Tawaran

Dani Pomanto untuk memindahkan pembangunan stadion ke wilayah Barombong atau Untia menjadikan dirinya sebagai *public enemy* bagi suporter bola di Makassar. Walikota dengan slogan “Kota tanpa Stadion” pun menjadi viral atas dirinya. Masyarakat menganggap resisten atas pembangunan stadion Mattoangin, walaupun sebetulnya realitasnya justru ingin merelokasi stadion bola ke tempat yang lebih luas. Tetapi dirinya sudah dianggap gagal menghadirkan stadion level dunia di Kota Makassar.

Diskursus akan kepemimpinan Dani Pomanto tidak hanya negatif dan prasangka buruk saja. Misalnya saja, selama masa Covid-19 memiliki kebijakan yang otentik dan unik yang membedakan dengan daerah lain di Indonesia. Misalnya saja tentang Kapal Laut yang disulap menjadi tempat isolasi mandiri bagi penyintas Covid-19 untuk menekan laju penyakit Covid-19. Sehingga kapal laut pun disulap menjadi tempat wisata bagi penyintas untuk bisa menikmati keindahan pulau-pulau sekitar Makassar. Kebijakan ini pun diikuti oleh pimpinan daerah lain seperti Medan, Bitung, Sorong, Lampung, dan beberapa daerah lainnya. Tujuan kebijakan ini untuk mengurangi wilayah darat sebagai pusat isolasi dan pemulihan. Inovasi dari Dani Pomanto terbukti bisa memberikan contoh bagi daerah lain untuk diimplementasikan. Artinya, narasi Dani Pomanto memiliki ciri khas sebagai kepala daerah dan menjadi *trend maker* dalam beberapa hal yang menurutnya adalah benar. Walaupun adanya symbol-simbol yang negatif dalam dirinya sebagai kepala

daerah, menjadikan popularitasnya tetap tinggi. Popularitas sebagai orang yang anti *mainstream* untuk kebijakan dan kinerjanya.

Berbeda dengan Adnan Purichta IYL yang masih bagian dari dinasti keluarga Yasin Limpo, sosok ini dianggap wajar bisa terpilih menjadi bupati Gowa karena tidak terlepas dari campur tangan almarhum bapaknya sebagai mantan Bupati Gowa dan pamannya sebagai Mantan Gubernur Sulawesi Selatan dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian. Apalagi saat itu, dia maju tidak diusung oleh partai politik, tetapi dari jalur perseorangan /independen. Di periode pertamanya, Adnan Purichta IYL dinilai kontroversial atas kebijakannya dalam mengintervensi keluarga Kerajaan Gowa untuk melindungi asset-asset kerajaan dengan adanya perda Lembaga Adat Daerah (LAD) Gowa. Kemudian muncul adagium di masyarakat, bahwa Bupati seolah-olah ingin juga menjadi Raja Gowa, dan Raja Gowa pun mau menjadi Bupati. Mengingat saat itu, Andi Maddusila Idjo sebagai Raja Gowa XXXVII menjadi kandidat; lawan terkuatnya dalam Pilkada Gowa di tahun 2015. Pertarungan wacana antara raja dengan bupati dalam sosok Adnan Purichta IYL sebagai penguasa di Gowa, inilah apa yang dikatakan Laclau dan Mouffe sebagai proses *being* menjadi *becoming* yang belum tuntas.

Sebagai orang yang terlahir dari klan Yasin Limpo (*nodal point*), Adnan Purichta IYL di awal kepemimpinan masih menjalankan program-program kerja warisan dari

bapaknya. Ciri khas sebagai Bupati dalam hal kebijakan belum tampak dan inovatif. Bahkan cenderung masyarakat antipati dan merasakan Kabupaten Gowa stagnan dalam pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastrukturnya. Pasca bapaknya meninggal, publik kemudian berbalik arah menjadi simpati atas kesedihan Adnan Purichta IYL yang ditampilkan dalam akun pribadi Instagram. Kebaihan dan keluhuran bapaknya sebagai guru politiknya ditampilkan dan dikemas dalam video.

Adnan Purichta IYL pun mulai mengembangkan kebijakan-kebijakannya selama menjabat. Misalnya yang setiap tahun dinantikan oleh anak-anak muda untuk berwisata sekaligus menikmati konser musik melalui program *Beautiful Malino*. Kegiatan ini tidak hanya mengundang artis-artis nasional dan lokal bahkan melakukan seminar budaya dan pesta olahraga. Tidak hanya dari masyarakat Makassar, bahkan dari kabupaten luar Gowa pun banyak yang sengaja datang untuk menikmati kegiatan tahunan ini. Karena kegiatan ini berhasil menggerakkan perekonomian di Kecamatan Tinggimoncong secara khusus, terlebih Kabupaten Gowa. Yang secara langsung memberikan pendapatan daerah dari potensi wisata yang dikembangkan.

Pelan-pelan Adnan Purichta IYL mulai menampakkan kepemimpinannya dalam pembangunan infrastruktur. Keberhasilan dirinya membuat *landmark* di Gowa seperti Kampung Rewako Gowa, Masjid Agung Syekh Yusuf, Lapangan Syekh Yusuf,

hingga Cimory Dairyland. Penggambaran keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan dirinya sebagai tafsir atas kemampuannya dalam tata kelola pemerintahan di bidang anggaran dan investasi. Sangat jauh berbeda dengan kepemimpinan bapak dan pamannya selama menjadi Bupati Gowa. Tidak hanya itu, menjabat bupati di periode keduanya, Adnan Purichta IYL terlihat lebih mendekat kepada kebijakan pro agamis. Mulai dari kenaikan jabatan bagi para pejabat eselon diwajibkan untuk tes mengaji hingga membentuk rumah Tahfidz untuk mencetak hafidz dan hafidzah Al-Qur'an. Diskursus atas narasi ini akhirnya membentuk realitas sosial bagaimana bekerjanya *the political* dalam ruang *politic* (Laclau & Mouffe, 2014).

Bagaimana artikulasi berbeda-beda itu mengitari *nodal point* dari tanda-tanda tertentu, ini terbentuk dari fenomena yang berlangsung. Munculnya argumen positif atau negatif tergantung dari hegemoni keduanya. Kedua objek (kepala daerah) dalam studi ini melihat tindakan histori mereka memiliki makna, dan makna itu merupakan produk dari sistem-sistem partikular yang memiliki perbedaan-perbedaan signifikan, yang bersifat spesifik dari aktivitasnya.

### ***Segmentasi Marketing Politik***

Dari diskursus wacana yang tergambarkan kemudian memberikan interpretasi berbeda-beda dari masyarakat. Dari kedua kepala daerah, apa yang disampaikan dalam postingannya secara implisit sebagai bagian dari marketing politik. Walikota Maka-

ssar dengan latar belakang sebagai teknokrat dan Bupati Gowa sebagai politisi menggambarkan konten-konten yang disajikan pun terlihat berbeda.

Untuk Instagram di Indonesia mencapai 97,38 juta orang pada Oktober 2022 yang didominasi oleh kelompok usia 25–34 tahun. Data ini seharusnya menjadi pijakan oleh Dani Pomanto dan Adnan Purichta IYL dalam membagikan konten-kontennya. Sebagai politisi dan pejabat public tampilan kemasan harus memahami kondisi psikologi dari kelompok usia tersebut untuk menarik simpati netizen

Dari diskursus tentang Dani Pomanto yang masih dalam ruang kontestasi tentang sosok dan kebijakannya, realitas sosial yang muncul adalah paradoks tentang dirinya sebagai Walikota Makassar. Akhirnya postingan gambar dan video Dani Pomanto kini selalu mendapatkan banyak hujatan dan makian dari netizen. Instagram sebagai media hegemoni Dani Pomanto tidak mampu memengaruhi atau mempersuasi masyarakat mengapresiasi atas postingannya. Ini terjadi pada masa periode jabatannya kedua menjadi walikota Makassar. Dan tidak seperti di periode pertamanya yang selalu mendapatkan pujian atau kalimat sanjungan untuk postingan aktivitasnya.

Postingan gambar dan video dalam perspektif marketing politik pun tidak menampilkan harapan netizen yang didominasi kelompok usia muda dan produktif. Media sosial hari ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyampaian pesan politik



(Anshori, 2019). Pesan politik ini bisa mengandung sosialisasi, kampanye diri bahkan pencitraan sebagai keberlanjutan atas eksistensi politisi. Dani Pomanto secara tampilan dan isi konten sosial medianya menampilkan aktivitas harian dan capaiannya, tetapi terlihat monoton, kaku dan formalitas pejabat pada umumnya. Komentar yang menyerang dirinya sebagai bentuk perlawanan (*counter*) hegemoni dari netizen untuk bentuk dominasi ataupun pengaruh yang dia bagikan. Inilah yang dimaknai oleh Laclau dan Mouffe (2014) bahwa hegemoni tidak lagi tunggal pada pemilik kuasa tetapi bisa berasal dari kelompok-kelompok sosial yang saling memengaruhi.

Karakter diri dari diskursus kepemimpinan Adnan IYL sebagai pemimpin muda, tampan, dan berwibawa jelas memiliki nilai pemasaran tinggi. Ditambah dengan sang istri yang cantik dan cakap menyanyi menambah kekhasan atas pasangan suami istri ini. Narasi positif dalam diskursus media sosial Instagram di akun pribadi dan akun istrinya membuat makna sosial parsial. Berangkat dari klan yang dulunya dibenci oleh orang-orang perlahan menjadi rasa suka dan tanpa sadar masyarakat bisa menghapus memori atas latar belakang dirinya. Kemasan konten yang ditampilkan terlihat lebih menarik, lucu dan bisa memenuhi kepuasan netizen yang membutuhkan hiburan.

Adnan Purichta IYL sadar untuk menampilkan konten di akunnya dalam media sosial Instagram sesuai dengan segmentasi usia yang menjadi pengikutnya (*follower*).

Jika dibandingkan dengan Dani Pomanto, Adnan Purichta IYL lebih banyak memiliki pengikut, padahal jumlah pengguna Instagram bisa jadi lebih banyak dari Kota Makassar dibandingkan dari Kabupaten Gowa. Dalam sepekan, isi konten media sosial Instagram Adnan Purichta IYL tidak hanya aktivitas dirinya sebagai pejabat ataupun membagikan kebijakannya yang unggul tetapi juga konten yang mengandung kelucuan atau jenaka. Sisi humoris tetapi masih menjaga wibawanya sebagai politisi adalah daya tarik netizen. Tanpa sadar proses hegemoni ini sedang berlangsung tanpa ada intimidasi atau paksaan. Dalam istilah Laclau & Mouffe sebagai *chain of equivalence* (rantai kesetaraan) pun terjadi dari pengikutnya yang melihat dirinya tanpa sekat jabatan, tetapi menyatu menjadi layaknya masyarakat biasa.

## KESIMPULAN

Instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan oleh kepala-kepala daerah dalam bersosialisasi dan memberikan informasi kepada pengikutnya (masyarakat). Dua media ini memberikan fasilitas untuk elit politik bisa memberikan kabar foto atau video. Sebelumnya mari melihat dua kepala daerah ini dari narasi yang idealis kemudian menjadi antagonisme menurut Laclau & Mouffe. *Pertama*, narasi Dani Pomanto sebagai Walikota Kota Dunia dan Adnan Purichta IYL sebagai Klan Yasin Limpo adalah *nodal point* dari medan diskursus yang berlangsung. *Kedua*, narasi-narasi atas diskursus yang polemik ataupun dukungan publik atas diri dan kebijakan dua kepala daerah

ini diartikan sebagai *political* dalam ruang *politic*.

Postingan gambar dan video Dani Pomanto dan Adnan Purichta IYL adalah bentuk akuntabilitas dari jabatannya, walaupun secara implisit kemasam pencitraan tidak bisa dipungkiri. Mereka diketahui bersama-sama sebagai calon terkuat menjadi Gubernur Sulawesi Selatan (*empty signifier*). Dari dua komparasi kepala daerah ini dalam perspektif hegemoni Laclau & Mouffe, kita bisa melihat bahwa Walikota Makassar gagal dalam mereduksi kekuasaannya dalam ruang virtual (media sosial). Alasannya ialah, karena apapun yang dia kabarkan atau postingannya akan menjadi polemic dan kontroversial dari komentar-komentar netizen. Baik dari akun pribadinya ataupun akun-akun lain yang menginformasikan kinerja atau potret sosok pribadinya. Justru sebaliknya, berbanding terbalik dengan Bupati Gowa yang terlihat berhasil melakukan hegemoni kepada pengikut-pengikutnya secara tidak sadar. Pengaruhnya cukup signifikan dari apa yang dia posting dan efek maksimal kepada netizen. Bukan hanya komentar yang baik diterima oleh Bupati Gowa, tetapi perilaku secara tidak sadar oleh netizen untuk mematuhi apa yang dikatakannya. Narasi-narasi kebencian kepada Dani Pomanto dan narasi dukungan kepada Adnan Purichta IYL adalah bentuk kontestasi diskursus yang masih berlangsung. Dalam istilah analisis Laclau dan Mouffe hal ini menggambarkan bahwa telah terjadi sebuah *chain of equivalence*. Para pengikutnya di Instagram adalah mereka yang menjadi pengikutnya, apakah sebagai pengikut (*fol-*

*lower*) yang baik atau pengikut yang buruk.

\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2019). Pakaian Syar'I, Media Dan Konstruksi Kesalehan Perempuan. *Sosiologi Reflektif, Vol. 13, No. 1*, 51-63.
- Anshori, A. (2019). Pencitraan Politik melalui Media Sosial terhadap Sikap Pemilih di Kota Medan. In F. J. Filosa Gita Sukmono, *Komunikasi dan Multikulturalisme di Era Disrupsi : Tantangan dan Peluang* (pp. 41-46). Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Boucher, G. (2008). *The Charmed Circle of Ideology: A Critique of Laclau and Mouffe, Butler and Žižek*. Melbourne: re-press.
- Darmalaksana, W. (2021). Islam, Hegemoni, dan Konstruksi Sosial: Studi Realitas Muslim Perkotaan Di Indonesia. *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021*, 1-9.
- Hutagalung, D. (2008). Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural: Membaca Laclau dan Mouffe. In E. Laclau, & C. Mouffe, *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru* (pp. 1-24). Yogyakarta: Resist Book.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (2014). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.

Novianto, A. (2017). Mendistorsi Hegemoni dan Anti-Esensialisme: Analisa “Mitos Tambang untuk Kesejahteraan” dalam Kerangkeng Liberalisme. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol. 3, No. 2, 279-285.

Rosyidah, F. N., & Nurwati, N. (2019). Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram. *Share : Social Work Journal*, Vol. 9, No. 1, 10-19.

Supriyadi. (2015). Analisis Wacana Kritis: Konsep dan Fungsinya Bagi Masyarakat. *Aksara: Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. 16, No. 2, 96-112.

Susanti, E. (2015). *Analisis Wacana Kritis: Hegemoni Media Sosial Twitter mengenai Isu-isu Nasional di Indonesia dan Implikasinya pada Mata Kuliah Analisis Wacana di Perguruan Tinggi*, Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Tohari, A., Nugraha, M., Khuzaimah, S., Hapsari, M., Muryana, & Sa'adah, F. (2002). *Politisasi Politik: Diskursus, Populisme dan Demokrasi (Bagaimana Melakukan Riset Menggunakan Teori Diskursus Laclau)*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Weninggalih, L., & Fuady, M. (2021). Hubungan Kampanye Politik Calon Presiden 2019 melalui Media Sosial Instagram dengan Keputusan Memilih Mahasiswa Indonesia di Thailand. *Jurnal Riset Public Relations*, Vol. 1, No. 1, 22-32.